

ABSTRAK

Judul : Kewenangan Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Badan Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Nama : Hambali
NIM : 2014 04 002

Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Kasus Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 044 PK/Pdt.Sus/2011 merupakan kasus putusan arbitrase yang pada tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pada tingkat banding dan peninjauan kembali Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang menjadi pertimbangan dalam menerima dan membatalkan perkara arbitrase yang sudah diputusan oleh arbitrase, Bagaimana kekuatan hukum terhadap putusan arbitrase setelah di batalkan oleh Pengadilan Negeri dan bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan keputusan arbitrase yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa Pengadilan negeri memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara arbitrase berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dengan berpedoman pada unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Kekuatan hukum terhadap putusan arbitrase setelah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum tetap namun tidak menutup kemungkinan para pihak untuk melakukan banding pada pengadilan Tinggi sampai pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Keputusan yang diambil pada masing-masing badan peradilan mungkin saja berbeda pada putusan di atasnya tergantung pada penemuan bukti-bukti baru yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. Akibat hukum dan Implikasi hukum terhadap pelaksanaan keputusan arbitrase yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Keputusan Arbitrase yang sudah dibatalkan maka keputusan arbitrase tersebut tidak berlaku namun para pihak dapat melakukan upaya hukum melalui banding, ataupun peninjauan kembali berdasarkan bukti-bukti baru yang dimiliki.

Kata kunci : Pembatalan, Arbitrase, Pengadilan

ABSTRACT

Title : Authorities Cancellation of Arbitration Decisions by Courts Based on Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.
Name : Hambali
NIM : 2014 04 002

Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution stated that the arbitration the parties may apply for the cancellation of the decision of the elements of the alleged existence of a letter or document that is recognized or otherwise false, the document that is hidden and the decision taken as a result of intrigue. Judicial Review of Supreme Court Case No. 044 PK / Pdt.Sus / 2011 was decided the arbitration case at first instance was canceled by the Central Jakarta District Court, and on appeal and judicial review the Supreme Court overturned the verdict of the District Court of Central Jakarta. Therefore, the purpose of this study is What is the authority of the District Court to consider accepting arbitration and cancel things that have been decided by arbitration, how the power of law to arbitration after revoked by the District Court and the legal implications of the implementation of arbitration decisions has been canceled by the Court? Using normative juridical research with a case study approach in mind that the state court has the authority to decide on the matter to arbitration pursuant to article 70 of the Arbitration Act, based on the elements for a letter or document that is recognized or otherwise false, the document that is hidden and the decision taken the results of trickery. The force of law against an arbitral award annulled by the Court of Justice after having legally binding but does not rule out the possibility of the parties to an appeal in the High Court and on appeal and judicial review. The decisions taken at each judicial body may be different in the decision on it depends on the discovery of new evidence that will be used as evidence in the trial. The result of law and legal implications of the implementation of the arbitration decision that was annulled by the Court of Justice of Implementation Implications Arbitral awards have canceled the decision of the arbitration is not the case but the parties can bring a legal action through an appeal or judicial review based on new evidence in their possession.

Keywords: Cancellation, Arbitration Court